



**SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO) – SP PLN
PERSATUAN PEGAWAI PT. INDONESIA POWER – PP IP
SERIKAT PEKERJA PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI – SP PJB**

No : 001/SPPLN-PPIP-SPPJB/PST/VII/2021

Jakarta, 26 Juli 2021

Lamp : -

Perihal : **Sikap Bersama Penolakan Holdingisasi** Kepada Yth :

Dan IPO Sektor Ketenagalistrikan Indonesia **Presiden Republik Indonesia**

Di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan rencana kementerian BUMN yang akan melakukan Holdingisasi PLTP dan Holdingisasi PLTU dan kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan IP (Initial Public Offering), untuk itu Kami, Serikat Pekerja di Lingkungan PT PLN (Persero) Group membuat beberapa pertimbangan :

1. Mahkamah Konstitusi telah konsisten pada 2 (dua) kali putusan Judicial Review Undang-Undang Ketenagalistrikan menetapkan Tenaga Listrik termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh sebab itu harus dikuasai oleh Negara.
2. Serikat Pekerja dari awal pembentukannya telah konsisten menentang Privatisasi (Swastanisasi) dan juga Unbundling terhadap sektor ketenagalistrikan dengan melakukan Judicial Review Undang-Undang Ketenagalistrikan sebanyak 2 kali.
3. PT PLN (Persero) mempunyai tugas yang spesifik yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) listrik Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) yaitu untuk Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
4. Tugas spesifik PT PLN (Persero) di tegaskan secara spesifik oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan dalam putusannya bahwa "Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mapu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai Holding Company".



**SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO) – SP PLN
PERSATUAN PEGAWAI PT. INDONESIA POWER – PP IP
SERIKAT PEKERJA PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI – SP PJB**

5. Dalam melaksanakan fungsi spesifiknya, PT PLN (Persero) juga mendapat subsidi dan juga kompensasi oleh Pemerintah yang tiap tahunnya mengalami kenaikan, untuk itu bila tidak mendapatkan perlindungan oleh Negara, maka ke depan sektor ketenagalistrikan akan memberatkan Keuangan Negara.
6. Sektor Ketenagalistrikan Indonesia juga erat kaitannya dengan Ketahanan Energi Negara. Hal ini merujuk pada kasus Black Out Pulau Nias selama 5 hari pada tahun 2016 karena sektor ketenagalistrikan tidak dikuasai oleh Negara sesuai panduan konstitusi.
7. Indonesia telah terikat dengan Paris Agreement yang sepakat mengedepankan pembangkit energi baru terbarukan, untuk itu harusnya ada negara yang terdepan dalam pengimplementasian energi baru terbarukan dengan PT PLN (Persero) sebagai leader.

Untuk itu, kami Serikat Pekerja di lingkungan PT PLN (Persero) Grup menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menolak Program Holdingisasi PLTP maupun Holdingisasi PLTU bila PT PLN (Persero) tidak menjadi Holding Company-nya, karena bertentangan dengan Konstitusi.
2. Menolak keras rencana Kementerian BUMN yang berminat untuk melakukan Privatisasi/IPO kepada usaha-usaha ketenagalistrikan yang saat ini masih dimiliki oleh PT PLN (Persero) dan anak usahanya karena bertentangan dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.
3. Mendukung Program Transformasi Organisasi Kementerian BUMN khususnya untuk mempercepat terbentuknya Holdingisasi Ketenagalistrikan dengan menggabungkan seluruh asset-asset ketenagalistrikan yang ada di BUMN-BUMN lain menjadi Holding Company di bawah PT PLN (Persero).
4. Mendukung agar PT PLN (Persero) menjadi leader di sektor Pengelolaan Energi Baru Terbarukan di Indonesia dengan memberdayakan Putra dan Putri Bangsa Indonesia.



**SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO) – SP PLN
PERSATUAN PEGAWAI PT. INDONESIA POWER – PP IP
SERIKAT PEKERJA PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI – SP PJB**

Demikian sikap bersama kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Sekretaris Jenderal SP PLN

Bintoro Suryo Sudibyo



Sekretaris I PPIP

Andy Wijaya



Sekretaris Jenderal SP PJB

Dewanto Wicaksono

Tembusan :

- Wakil Presiden
- Ketua DPR RI
- Komisi 1 DPR RI
- Komisi 6 DPR RI
- Komisi 7 DPR RI



**SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO) – SP PLN
PERSATUAN PEGAWAI PT. INDONESIA POWER – PP IP
SERIKAT PEKERJA PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI – SP PJB**

- Komisi 9 DPR RI
- Mahkamah Konstitusi
- Dewan Pertimbangan Presiden
- Kantor Staf Presiden
- Menko Marvel Invest
- Menko Perekonomian
- Menteri BUMN
- Menteri ESDM
- Menteri Keuangan
- Komisaris PT PLN (Persero)
- Direksi PT PLN (Persero)
- Direksi PT Indonesia Power
- Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali